EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA KOTA PADANG TAHUN 2018

Nopriadi[1], Nizwardi Azkha[1], Emy Leonita[2]
[1]Departemen Kesehatan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
[2]STIKes Hang Tuah Pekanbaru

nopriadi_dhs@yahoo.com
nopriadi@ph.unand.ac.id

Abstract

Padang City has won a clean city award 19 times and that has received the most Adipura awards in Indonesia. However, after the earthquake on September 30, 2009, many infrastructures were destroyed, so in 2010, 2011, 2013 to 2016 no longer received the Adipura award. This study aims to evaluation of the Adipura program implementation in Padang City year 2018 based on the components of input, process and output.

This study uses a qualitative method, carried out in May-October 2018 using guidelines for in-depth interviews, field observations, and document review. The informants of the study were determined purposively. Data analysis using content analysis techniques with the help of matrices, and triangulation of sources and methods to avoid information refraction.

The results of the research on the input component indicate that the implementation of the Adipura program in the city of Padang based on Minister of Environment Regulation Number 53/2016 by involving various government agencies, communities and universities, using the budget from the Regional Budget and supported by facilities and infrastructure. In the process component, the Adipura program has been carried out before the assessment, starting from preparing everything needed in terms of material and monitoring points. Coordinated by the Environmental Service. Currently entering the second assessment phase, and waiting for the letter to call the presentation by the Ministry of Environment.

It can be concluded that the implementation process of the Padang City Adipura Program has been carried out quite well, but for subsequent programs it is necessary to conduct routine guidance and more cross-sectoral involvement of higher education institutions as well as community participation, increased budget and infrastructure.

Keywords: Evaluation, Adipura, Padang City

PENDAHULUAN

Kota merupakan lingkungan buatan manusia yang dibentuk dalam waktu yang relatif panjang. Kota selalu bersifat dinamis. Permasalahan lingkungan yang terjadi di banyak kota, antara lain masalah kebersihan (sampah), ketersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara serta pencemaran air, termasuk di dalamnya isu perubahan iklim. (1)

Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2016 di Indonesia telah berkembang dengan sangat dinamis dan perkembangan baru dengan cara mengatur diri sendiri yang lentur dan lebih bertumpu pada inisiatif dan inovasi masyarakat untuk mengelola lingkungannya secara adiptif. (2)

Program Adipura merupakan salah satu program pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan baik secara ekologis, social, dan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance)* di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.(3)

Hak cipta milik Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id
Repository University of Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Pemantauan Adipura dilakukan dalam 3 tahap terdiri atas pemantauan pertama (P1), pemantauan kedua (P2) atau pemantauan verifikasi (PV). Pelaksanaan program Adipura disesuaikan dengan pedoman pelaksanaan Adipura yang terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura.[4]

Kota Padang merupakan tonggak sejarah dalam pelaksanaan program Adipura. Definisi Adipura adalah kota yang sempurna, ideal, baik dan agung. Berawal pada tahun 1984 dilaksanakan pertemuan Kepala Daerah (Bupati dan Walikota se-Indonesia di Bukittinggi membahas tentang dilaksanakannya program Adipura. Menindaklanjuti pertemuan ini, maka pada tahun 1986 dilaksanakanlah lomba program Adipura antar kabupaten dan Kota se-Indonesia, Kota Padang telah berhasil meraih penghargaan kota bersih. Itu sejak dilombakan dari tahun 1986 s/d tahun 2009 sebanyak 17 (tujuh belas) kali dan merupakan kota paling banyak menerima penghargaan Adipura di Indonesia, namun setelah terjadi gempa bumi tanggal 30 September 2009 yang lalu, Kota Padang tidak lagi menerima penghargaan kota bersih ini karena hampir semua infra struktur Kota Padang telah hancur akibat gempa, berkat kegigihan dan keuletan Pemko Padang beserta jajarannya maka pada tahun 2012 kembali meraih penghargaan Adipura, walaupun hanya dalam bentuk sertifikat berupa penghargaan *Best Effort*.[5]

Pada tahun 2017 Kota Padang kembali berhasil meraih Adipura untuk kategori kota besar. Pada tahun 2018 Kota Padang bertekad untuk mempertahankan perolehan penghargaan Adipura yang diperoleh pada tahun 2017 tersebut. Namun berdasarkan hasil pengumpulan data awal melalui wawancara dengan informan yang merupakan anggota Tim Penilai Adipura, diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan program Adipura di Kota Padang tidak dilakukan pembinaan secara kontinu, dalam pembinaan rutin juga belum melibatkan lintas sektoral seperti dari perguruan tinggi, peran serta masyarakat masih kurang, dan evaluasi belum dilakukan secara optimal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk mengevaluasi pelaksanaan program Adipura di Kota Padang. Penelitian dilakukan pada bulan Mei-Oktober 2018 di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di PT Pertamina (Persero) RU II Dumai yang beralamat di Jalan Puteri Tujuh, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2018.

Dalam penelitian ini peneliti merupakan instrument penelitian yang akan berinteraksi secara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam dan pedoman observasi. Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yang terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pasar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Kota Padang dan Tokoh masyarakat/Akademisi.

Sumber datanya adalah data primer melalui wawancara kepada informan dan observasi langsung lapangan, serta data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur dan dokumen yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kota Padang, Semua kegiatan dalam wawancara dicatat atau direkam. Wawancara terhadap informan dapat dilakukan berulang kali, sampai tercapai informasi yang diinginkan.[7] Metode observasi dilakukan untuk mengamati langsung keberadaan objek di lapangan, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.

Hak cipta milik Universitas Riau
Repository University of Riau https://repository.unri.ac.id
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Hak cipta milik Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id
Repository University of Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Padang adalah ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera dengan luas wilayah seluas 694,96 km^2 yang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan/desa.Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Padang dengan tugas dan fungsi untuk melakukan pembinaan, pengkoordinasian, dan penyusunan kebijakan dibidang pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Padang dimana Adipura merupakan salah satu program yang di koordinir langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup.

INPUT

Kebijakan merupakan salah satu hal yang penting dalam proses pelaksanaan. aturan dalam pelaksanaan program adipura telah dijalankan, akan tetapi keberadaan dari pelaksanaan itu kurang terihat.

Tabel 1 Matriks Triangulasi Kebijakan

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
Pedoman Pelaksanaan	Aturan atau pedoman yang digunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 53 tentang pedoman pelaksanaaan program adipura.	Dalam Permen LH No. 53 mengatur segala aturan terkait pelaksanaan program adipura.	Pedoman dalam pelaksanaan program adipura Kota Padang tahun 2018 yaitu Permen LH No.53 tahun 2016.
Penerapan Peraturan	Aturan telah diterapkan pada masing-masing instansi, tetapi masih terdapat beberapa yang belum diterapkan	Terdapat catatan pelaporan data sebagai pendukung pelaksanaan program adipura	Peraturan pelaksanaan telah diterapkan oleh setiap instansi hanya saja belum semua yang diterapkan

Penelitian Lusiana.N dkk,[8] yang menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup perlu dukungan pemerintah dalam hal kebijakan dan keterpaduan program antar SKPD untuk penerapan kebijakan yang sistematis, efektif dan efisien. Dukungan awal yang perlu dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Daerah adalah komitmen untuk tegas dalam pelaksanaan kegiatan dan pemberian reward kepada petugas kebersihan sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai maupun mempertahankan anugerah Adipura[9]

Tabel 2 Matriks Triangulasi Sumber Daya Manusia

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
SDM yang terlibat	Berbagai instansi pemerintahan terlibat dalam pencapaian program Adipura Kota Padang tahun 2018,	Petugas yang terlibat dalam kebersihan lingkungan, meliputi tenaga kebersihan.	Berbagai instansi pemerintahan terlibat dalam pencapaian program Adipura Kota Padang Tahun 2018,
Peran Masyarakat	Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program Adipura	Daftar hadir rapat koordinasi	Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan program Adipura

Hak cipta milik Universitas Riau
Repository University of Riau https://repository.unri.ac.id
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Keterlibatan SDM di masing-masing SKPD masih diberdayakan pada program yang ada. Terutama pada dinas kesehatan, SDM pelaksana adalah pada puskesmas yang membidangi sanitasi sekaligus memantau kebersihan pasar[10]. Diharapkan Pemerintah Kota Padang dapat terus melakukan sosialisasi terkait program Adipura kepada masyarakat agar masyarakat dapat memberikan kontribusi dalam persiapan program Adipura.

Tabel 3 Matriks Triangulasi Dana

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
Ketersediaan anggaran	Anggaran ada tetapi masuk dalam anggaran program lainnya, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan adipura	- Terdapat pembukuan ketersediaan anggaran tetapi masuk dalam program lainnya	-Anggaran ada tetapi masuk dalam anggaran program lainnya, tidak ada anggaran khusus untuk pelaksanaan adipura
Sumber Dana	Sumber dari APBD	-	Sumber dari APBD
Kecukupan anggaran	Anggaran belum sesuai antara yang dibutuhkan dengan anggaran yang ada	-	Anggaran belum sesuai antara yang dibutuhkan dengan anggaran yang ada

Harapannya Pemerintah Kota Padang dapat melakukan penambahan anggaran terkait program Adipura agar keterbatasan dan kendala pelaksanaan Adipura terkait biaya dapat diselesaikan.

Tabel 0 Matriks Triangulasi Sarana dan Prasarana

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
Ketersediaan sarana dan prasarana	Sarana dan prasana banyak di disediakan untuk penunjang dalam pelaksanaan, namun belum sesuainya antara ketersediaan serta kebutuhan yang ada.	Terdapat data kesediaan sarana dan prasarana, seperti truk pengangkut sampah dan container penampungnya	Sarana dan prasana banyak di disediakan untuk penunjang dalam pelaksanaan, namun belum sesuainya antara ketersediaan serta kebutuhan yang ada. Terdapat data kesediaan sarana dan prasarana

Sarana prasarana yang ada juga perlu maintenance sehingga mencegah dari kerusakan yang dapat menghambat kinerja petugas.[11] Kementerian Lingkungan Hidup berupaya merumuskan dan melaksanakan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*Good Environmental Governance (GEG)*, yang selanjutnya diistilahkan dengan Tata Praja Lingkungan.[12] Inti dari penerapan Tata Praja Lingkungan adalah penguatan sistem koordinasi, sehingga

pemerintah bisa mendapatkan respon (tanggapan) yang tepat untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan yang mendesak.[6]

PROSES

Tabel 5 Matriks Triangulasi Planing

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
Perencanaan	Persiapan pelaksanaan program adipura dimulai dari awal tahun, dimulai dengan menyiapkan apa yang perlu ditambahkan, koordinasi dengan pemerintah serta instasi daerah dan juga melakukan sosialisasi serta observasi titik pantau.	Terdapat pencatatan data persiapan pelaksanaan, dimulai dari data timbulan sampah, jumlah sarana prasarana dan kondisi titik pantau.	Persiapan pelaksanaan program adipura dimulai dari awal tahun, dimulai dengan menyiapkan apa yang perlu ditambahkan, koordinasi dengan pemerintah serta instasi daerah dan juga melakukan sosialisasi serta observasi titik pantau.

Terdapat beberapa kekurangan dalam perencanaan yang telah dilaksanakan seperti jadwal pelaksanaan program Adipura terkadang tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Jadwal penilaian Adipura tidak pasti, sehingga pihak-pihak yang terkait tidak dapat mempersiapkan diri secara maksimal.

Tabel 6 Matriks Triangulasi *Organizing*

Aspek yang Diteliti	*Indepth Interview*	Telaah Dokumen	Kesimpulan
Pengorganisasian	Diikoordinir oleh DLH, kemudian di lakukan pengawasan secara langsung oleh bidang PK2L beserta staff nya, dan instansi lainnya yang ikut mendukung dalam pelaksanaan program adipura	Tidak adanya struktur khusus dalam program adipura	Persiapan pelaksanaan program adipura dimulai dari awal tahun, dimulai dengan menyiapkan apa yang perlu ditambahkan, koordinasi dengan pemerintah serta instasi daerah dan juga melakukan sosialisasi serta observasi titik pantau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
Hak cipta milik Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id
Repository University of Riau

Terdapat kekurangan dalam pengorganisasian yang memungkinkan kurang optimalnya pelaksanaan program yakni dalam kegiatan rapat koordinasi yang ikut sebagai peserta rapat sering berganti sehingga yang hadir berikutnya tidak menguasai masalah, dan dalam rapat koordinasi perlu beberapa item yang harus menjadi keputusan saat rapat tersebut. Hal ini akan menyebabkan sasaran tidak dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan.

Kota padang telah berhasil mendapatkan piala adipura kencana pada beberapa tahun sebelumnya, dan ini menjadikan segala pihak berusaha untuk mendapatkan kembali piala adipura tersebut. Pelaksanaan koordinasi juga merupakan satu upaya yang penting dalam keberhasilan meraih Adipura. Pimpinan secara langsung mengawasi kegiatan dilapangan untuk mengetahui beberapa hambatan dan kelemahan dari pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat segera ditangani.[9] Hal yang sama juga dilakukan di Kabupaten Maros dimana pemerintah turun langsung kelapangan dalam melakukan kerja bakti dan sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya memperoleh Adipura.[14]

OUTPUT

Salah satu output yang diharapkan adalah kesesuaian pelaksanaan Adipura dengan criteria dan standar penilitan merupakan target yang diharapkan. Upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan LSM dan kelurahan, kecamatan, Dinas Kebersihan Pasar (DKP) untuk pencapaian outpun dan outcome yang sesuai dengan harapan.[13]

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan program Adipura di Kota Padang berdasarkan Permen LH No. 53 Tahun 2016. Sumber Daya Manusia yang terlibat adalah dari berbagai pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pasar, Dinas Pendidikan dan juga OPD atau organisasi perangkat desa dan masyarakat Tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan program adipura tetapi masuk dalam anggaran program lainnya yang bersumber dari APBD. Sarana dan Prasarana yang mendukung yaitu taman, tempat wisata, container serta sarana lainnya yang mendukung kebersihan lingkungan untuk menjadi penilaian adipura.

Perencanaan telah dilaksanakan jauh sebelum penilaian, mulai dari mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan baik dari segi material maupun titik pantau. Pelaksanaan Program Adipura Kota Padang telah memasuki tahap penilaian kedua, dan menunggu surat panggilan presentasi oleh Kementrian Lingkungan hidup. Namun upaya yang dilakukan belum optimal, terutama dalam hal pembinaan rutin dan melibatkan lintas sektoral dari perguruan tinggi dan peran serta masyarakat masih kurang.

Proses pelaksanaan Program Adipura Kota Padang telah terlaksana cukup baik sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Permen LH No. 53 tahun 2016 baik dari segi input maupun proses, hanya masih terdapat beberapa aspek seperti anggaran dan sarana prasarana serta kesadaran masyarakat dalam peningkatan penilaian untuk tercapainya kota padang mendapatkan piala Adipura masih perlu ditingkatkan.

Saran dari hasil penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup perlu mengadakan penambahan sarana pelaksanaan Adipura agar persiapan Adipura dapat terlaksana secara maksimal. Kepada Dinas yang terkait dalam pelaksanaan Adipura agar dapat berkoordinasi secara maksimal untuk dapat mencapai target dan sasaran program Adipura.

DAFTAR PUSTAKA

Budihardjo, E dan S. Hardjohubojo. 2009. Wawasan Lingkungan Dalam Pembangunan Perkotaan.ALUMNI.Bandung.

Bapedalda. Laporan kegiatan Bapedalda, 2016. Padang: Bapedalda; 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
Repository University of Riau https://repository.unri.ac.id © Hak cipta milik Universitas Riau

KEMENLH. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan ADIPURA

PermenLH. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Adipura. Jakarta: KemenLH; 2014.

Bapedalda. Tugas dan Fungsi Bapedalda. Padang: Bapedalda Kota Padang; 2016.

PermenLH. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura. Jakarta: KemenLH; 2016.

Mulyana, D., (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya. Penerbit PT Remaja Rodakarya, Bandung.

Lusiyana, N, Agus Setya, Henri Buchari . 2014 Kajian Efektivitas Program Adipura Sebagai Upaya Mendukung Pembentukan Tata Lingkungan Kota Bandar Lampung. Jurnal Sains dan Pendidikan, Vol 1 No.2 : 29-37

Yunus, M (2015) Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Meraih Penghargaan Adipura di Kabupaten Pasaman. JOM FISIP. Vol.2 No.2: 1-10

Muslih, M. 2016. Efektifitas Peraturan Daerah Kota Jambi No.8 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dalam Mewujudkan Lingkungan Sehat dan Bersih di Kota Jambi. Legalitas Edisi Desember Vol. 8 No.2: 32-47

Septiana,I., (2016) Evaluasi Strategi Pemerintahan Kota Pekanbaru dalam Mempertahankan Adipura. JOM FISIP. Vol.3 no.2: 1-14

KEMENLH. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tantang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kemenlh; 1997.

Riduansyah.M (2015) Evaluasi Program Kebersihan Lingkungan Pasar di Kota Banjarmasin. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi. Vol 5 No.1 : 131-142

Zulfikar, Djuliati Saleh, Andi, Rodianti Razak (2015) Strategi Pemerintah dalam Penerimaan Adipura di Kabupaten Maros. Jurnal Administrasi Publik. Vol.1 No.2 :183-198

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.
Hak cipta milik Universitas Riau
https://repository.unri.ac.id
Repository University of Riau